

Analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan perkotaan akibat krisis ekonomi di DKI Jakarta tinjauan kasus pelaksanaan kebijakan PDM-DKE di DKI Jakarta dan P2KP di Kelurahan Kapuk-Cengkareng, Jakarta Barat

Ignatius Anindya Wirawan Nugrohadhi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=94840&lokasi=lokal>

Abstrak

Penulisan tesis ini bertujuan menjawab berbagai kegagalan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengatasi kemiskinan dalam masa krisis ekonomi dengan meninjau implementasi kebijakan PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Krisis Ekonomi) Dan PZKP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) di Jakarta dengan kasus pelaksanaan di Kelurahan Kapuk di Jakarta Barat. Selain itu dari acuan kegagalan tersebut, penulis berusaha menyusun konsep pemberdayaan bagi pengentasan kemiskinan melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat yang optimal dalam mengatasi kemiskinan perkotaan di Jakarta. Peralatan AHP (Ana/yer Hierarchy Process) digunakan untuk menyempurnakan konsep penyempurnaan program pemberdayaan dengan basis dari berbagai elemen yang diambil dari konsep dan pelaksanaan P2KP dan PDM-DKE di Jakarta dengan kasus kelurahan Kapuk.

Adapun alasan Kelurahan Kapuk dijadikan sebagai tempat atau Studi kasus dilaksanakannya kedua program tersebut disebabkan kelurahan tersebut menerima alokasi dana terbanyak (1997-1998/1999) di Jakarta melalui dua program yang bercirikan pemberdayaan masyarakat (P2KP dan PDM-DKE) juga dikarenakan mewakili kawasan miskin dan kumuh Serta padat Jakarta dilihat jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kondisi permukiman.

Penelitian ini adalah juga studi kasus kebijakan yang melihat proses pelaksanaan hasil kebijakan atas penanggulangan kemiskinan di Jakarta khususnya masa krisis ekonomi tahun 1996 akhir -1998 lalu. Adapun kedua kebijakan P2KP dan PDM-DKE dianalisis sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat yang tidak tepat untuk masyarakat Jakarta berdasarkan studi literatur dan berbagai hasil survey serta dengan bantuan informasi para expert yang mewakili setiap stakeholder atas tujuan kebijakan pemberdayaan masyarakat.